

Menganalisis Siklus Anggaran APBN/APBD

Molisah¹, Wahjoe Pangestoeti², Marzila Putri³, Puja Wanti Saragih⁴, Jana Marvela⁵

¹²³⁴⁵Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 22, 2024

Revised April 27, 2024

Accepted May 02 2024

Available online May 12, 2024

Keywords:

Siklus, Anggaran, APBN/APBD

Keywords:

Cycle, Budget, APBN/APBD



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Studi ini menyajikan analisis tentang siklus anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia, dengan fokus pada efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Metode penelitian yang digunakan mencakup survei, wawancara, dan analisis data anggaran dari berbagai sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus anggaran APBN/APBD mengalami tantangan dalam mencapai efisiensi dan akuntabilitas yang optimal. Pertama, dalam fase perencanaan, terdapat kebutuhan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan legitimasi keputusan anggaran. Kedua, dalam fase pelaksanaan, ditemukan beberapa hambatan terkait dengan pengelolaan anggaran, termasuk rendahnya kualitas pengawasan dan kontrol, serta kurangnya kapasitas institusi terkait. Ini menimbulkan risiko penyalahgunaan dan pemborosan anggaran, mengancam efisiensi penggunaan sumber daya publik. Ketiga, dalam fase evaluasi dan pelaporan, transparansi dan akuntabilitas masih menjadi permasalahan utama. Kurangnya keterbukaan dalam pelaporan keuangan publik dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan

menyulitkan pemantauan kinerja keuangan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, disarankan adanya langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan anggaran, peningkatan pengawasan dan kontrol selama pelaksanaan anggaran, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang lebih terbuka dan mudah dipahami. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah di tingkat nasional dan daerah

ABSTRACT

This study presents an analysis of the budget cycle of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Indonesia, with a focus on efficiency and accountability in public financial management. The research methods used include surveys, interviews and analysis of budget data from various trusted sources. The research results show that the APBN/APBD budget cycle experiences challenges in achieving optimal efficiency and accountability. First, in the planning phase, there is a need to strengthen community participation in the budget preparation process to increase accountability and transparency. Active involvement of all stakeholders is expected to increase the legitimacy of budget decisions. Second, in the implementation phase, several obstacles were found related to budget management, including the low quality of supervision and control, as well as a lack of capacity of the relevant institutions. This raises the risk of misuse and waste of the budget, threatening the efficient use of public resources. Third, in the evaluation and reporting phase, transparency and accountability are still the main problems. Lack of transparency in public financial reporting can reduce public trust in the government and make it difficult to monitor financial performance. In order to increase the efficiency and accountability of public financial management, strategic steps are recommended, including increasing public participation in the budget planning process, increasing supervision and control during implementation. budget, as well as increasing transparency and accountability through financial reporting that is more open and easy to understand. These steps are expected to optimize the use of public resources and improve government financial performance at the national and regional levels.

PENDAHULUAN

Tabel Pendapatan dan Remunerasi Nasional dan Tabel Pembelian Daerah (merupakan instrumen kunci dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Siklus anggaran, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, menjadi kerangka kerja yang penting dalam proses ini. Penelitian tentang siklus anggaran APBN/APBD memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan anggaran publik di Indonesia telah menjadi fokus utama reformasi pemerintah. Meskipun

*Corresponding author

E-mail addresses: molisamolli599@gmail.com

berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam siklus anggaran APBN/APBD. Keterbatasan dalam partisipasi masyarakat, pengawasan yang kurang efektif, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi beberapa masalah yang perlu diatasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek siklus anggaran APBN/APBD. Penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan kontrol selama pelaksanaan anggaran guna mengurangi risiko penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan sebelumnya, masih terdapat celah pengetahuan yang perlu diisi. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam tentang siklus anggaran APBN/APBD dengan fokus pada efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, pada tahap pelaksanaan, pengawasan dan kontrol yang lebih efektif dianggap penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan serta kontrol, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dapat ditingkatkan.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang siklus anggaran APBN/APBD di Indonesia serta untuk mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kajian pustaka (*systematic literature review*). Penelitian kajian literatur adalah suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan publikasi pustaka lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu (Marzali, 2017). Pengumpulan data kajian literatur dilakukan melalui kajian pustaka dari sumber-sumber rujukan yang relevan dari buku dan jurnal untuk dianalisis dan diklasifikasi.

Penelitian kajian literatur memiliki beberapa tahapan. Tahapan kajian literatur meliputi pengumpulan artikel, reduksi artikel atau mengurangi jumlah artikel berdasarkan variabelvariabel, display artikel atau penyusunan dan menata artikel-artikel terpilih, pengorganisasian dan pembahasan, dan penarikan kesimpulan (Asbar & Witarsa, 2020). Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menetapkan tahapan penelitian sebagai berikut: pemilihan fokus kajian, mencari informasi yang relevan, mengkaji teori yang relevan, mencari landasan teori dari para ahli maupun hasil penelitian terdahulu, menganalisis teori dan hasil penelitian yang relevan dan penarikan kesimpulan. Adapun sumber rujukan penelitian adalah buku, jurnal nasional, dan jurnal internasional yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai menurut Tentang- Undang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , yang selanjutnya disebut APBN , adalah mata uang nasional tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat . Nomor 17 Tahun 2003 , Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , yang selanjutnya disebut APBN , adalah mata uang nasional tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat . Menurut kepada M.Suparmoko , APBN adalah laporan atau pernyataan yang akurat mengenai perkiraan penerimaan dan transfer sumber daya nasional dalam jangka waktu tertentu , biasanya dalam satu tahun . Suparmoko, APBN adalah laporan atau pernyataan yang akurat mengenai perkiraan penerimaan dan transfer sumber daya nasional dalam jangka waktu tertentu , biasanya dalam satu tahun . Menurut Nurjaman Arsyad , pengertian APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dan akan dirundingkan dari sudut pandangnya . fungsi APBN sebagai sarana perolehan mata uang nasional dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (4) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Mata Uang Nasional yang menyatakan bahwa “ APBN mempunyai fungsi Otorisasi , Perencanaan , Pengawasan, Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi.”

Berdasarkan padapenjelasan penjelasandiberikan , dapat dipahami bahwa tujuan Otorisasi adalah agar APBN berfungsi sebagai dasar dalam melakukan pembayaran dan perundingan pada saat krisis keuangan ; tujuan Perencanaan adalah untuk mengakui APBN sebagai mitra dalam negosiasi suatu proyek pada saat krisis keuangan ; dan fungsi Pengawasan memberikan APBN sarana untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan pemerintah pusat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya .Asalkan dapat dipahami bahwa tujuan Otorisasi adalah agar APBN menjadi dasar dalam melakukan pembayaran dan perundingan selamaperiode krisis keuangan ; tujuan Perencanaan adalah untuk

mengakui APBN sebagai mitra dalam negosiasi suatu proyek pada saat krisis keuangan ; dan fungsi Pengawasan memberikan APBN sarana untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan pemerintah pusat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya . Berdasarkan padalandsan hukum di atasatas , dapat disimpulkan bahwa APBN merupakan manat konstitusi yang perlu dilaksanakan seefisien mungkin oleh pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan .landasan hukumnya , dapat disimpulkan bahwa APBN merupakan manat konstitusi yang perlu dilaksanakan seefisien mungkin oleh pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan . Oleh to this, itu APBN must scrutinize government efforts as upaya the primary sebagai pemberi pinjaman utama kekayaan nasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang dicanangkan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

SIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan analisis mendalam tentang siklus anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia. Dengan fokus pada efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, penelitian ini menyajikan temuan yang penting untuk pemahaman dan perbaikan lebih lanjut dalam konteks pengelolaan anggaran publik. Dalam proses perencanaan anggaran, partisipasi masyarakat diidentifikasi sebagai elemen kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat legitimasi keputusan anggaran dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan anggaran, ditemukan beberapa hambatan yang menghalangi efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Pengawasan dan kontrol yang kurang efektif menjadi permasalahan utama, meningkatkan risiko penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. Kurangnya kapasitas institusi terkait juga menjadi faktor penting yang menghambat pelaksanaan anggaran yang efisien. Dalam konteks evaluasi dan pelaporan, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi tantangan. Kurangnya keterbukaan dalam pelaporan keuangan publik dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyulitkan pemantauan kinerja keuangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan anggaran, peningkatan pengawasan dan kontrol selama pelaksanaan anggaran, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang lebih terbuka dan mudah dipahami. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang permasalahan dan tantangan dalam siklus anggaran APBN/APBD di Indonesia serta mengidentifikasi strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik dan meningkatkan kinerja keuangan baik di tingkat nasional maupun daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan dukungan dari berbagai sumber literatur yang menjadi landasan penelitian ini. Metode literatur review memungkinkan kami untuk menyusun analisis yang komprehensif dan mendalam tentang siklus anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia. Dengan keberagaman pandangan, teori, dan hasil penelitian yang kami eksplorasi, kami dapat merangkum berbagai perspektif yang relevan untuk memahami tantangan dan potensi solusi dalam pengelolaan keuangan publik. Kontribusi dari berbagai karya literatur memberikan landasan yang kuat bagi kesimpulan dan rekomendasi yang kami sampaikan dalam jurnal ini.

Kami juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada para penulis, peneliti, dan praktisi yang telah berkontribusi dalam memproduksi literatur yang menjadi fokus penelitian kami. Tanpa sumbangan mereka dalam bidang ini, penelitian ini tidak akan menjadi mungkin. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam memperkaya pengetahuan kita tentang manajemen anggaran publik. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman dan perbaikan praktik pengelolaan keuangan publik di Indonesia dan di seluruh dunia.

REFERENSI

- Hidayat, M. (2020). Analisis Siklus Anggaran Pemerintah Daerah dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 22(2), 87-101.
- Pratama, D., & Wahyudi, E. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 97-110.

- Indriani, D., & Kusuma, I. W. (2021). Efektivitas Pengawasan Anggaran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 13(2), 140-150.
- Prastowo, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Anggaran Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 45-56.
- Yusuf, M., & Mukhlis, M. (2020). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 165-178.
- Setiawan, B., & Kusnandar, E. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Penggunaan Dana APBD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 23-36.
- Sari, D., & Rusman, A. (2021). Peran Pengawasan Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 53-65.
- Kurniawan, D., & Syah, S. (2018). Implementasi Kebijakan Transparansi Anggaran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 121-134.
- Susanto, A., & Huda, N. (2020). Analisis Efektivitas Pengawasan Intern dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 117-129.
- Ardiansyah, R., & Susanto, A. (2019). Peran Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 92-106.
- Nurfalah, S., & Permana, D. (2021). Pengaruh Kualitas Pengawasan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(1), 37-48.
- Suhendri, A., & Utami, R. (2018). Dampak Keterbukaan Informasi Anggaran terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 35-46.
- Wirawan, A., & Dewi, N. K. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 97-110.
- Rofiqoh, A., & Haryanto, E. (2020). Peran Kualitas Laporan Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 50-62.
- Fitriyani, E., & Santoso, P. (2018). Peningkatan Efisiensi Penggunaan Dana Desa melalui Peningkatan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 25-36.